

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera yang beropini WTP-WDP dengan rasio Aktivitas lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera yang beropini WTP-WDP dengan rasio Kemandirian lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera yang beropini WTP-WDP dengan rasio Efektivitas tidak lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera yang beropini WTP-WDP dengan rasio Efisiensi lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan beropini TW-TMP.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera antara Induk dengan rasio Kemandirian lebih baik dan berbeda secara signifikan dengan Anak/Pemekaran.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera antara Induk dan dengan rasio Efektivitas tidak lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan Anak/Pemekaran.
7. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera antara Induk dan dengan rasio Efisiensi lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dengan Anak/Pemekaran.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera yang beropini WTP-WDP tidak lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera yang beropini TW-TMP, maka penelitian ini memiliki implikasi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan ini memberikan bukti empiris banyak terjadi masalah dan ketegangan antar tingkatan pemerintah berkaitan dengan kewenangan daerah. Ada tiga jenis masalah yaitu: antara pusat dan daerah, antara daerah propinsi dan kabupaten, antar daerah kabupaten/kota sendiri. Terbatasnya jumlah PNS yang sarjana dan profesional, terutama untuk bidang teknis penganggaran. Sedangkan secara praktis, temuan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk

tidak mengabaikan penilaian kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.07/2011 tentang pemberian dana insentif daerah, temuan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Menteri Keuangan untuk memasukan dan menambahkan kinerja keuangan yang terdiri dari atas kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan indikator kinerja keuangan lainnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana insentif daerah. sehingga dana daerah yang mendapat dana insentif tersebut adalah daerah yang benar-benar berkualitas, baik secara pengelolaan keuangannya maupun secara kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Induk tidak lebih baik dan tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Anak/Pemekaran, maka penelitian ini memiliki implikasi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan ini memberikan bukti empiris banyak terjadi masalah dan ketegangan antar tingkatan pemerintah berkaitan dengan kewenangan daerah. Ada tiga jenis masalah yaitu: antara pusat dan daerah, antara daerah propinsi dan kabupaten, antar daerah kabupaten/kota sendiri. Terbatasnya jumlah PNS yang sarjana dan profesional, terutama untuk bidang teknis. Sedangkan secara praktis, temuan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk tidak mengabaikan penilaian kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan, dan tidak menganggap remeh kabupten Anak/Pemekaran walaupun daerah ini baru.

5.3 Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang masih perlu direvisi pada penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan selama periode 6 tahun, karena rentang waktu yang terbatas maka penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota secara luas.
3. Penelitian ini masih terbatas pada empat variabel penelitian yaitu, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas saja.

5.4 Saran- saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah, agar pemerintah daerah mengevaluasi kinerja pemerintahannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik, dan penerapan kebijakan serta kewenangan yang lebih jelas.
3. Pemerintah harus lebih cermat dalam meng-anggarkan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi seluruh pendapatan yang di

terimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

4. Kebijakan pada bidang keuangan daerah perlu dilakukan dalam upaya menunjang kesinambungan pembangunan dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan sumber keuangan yang handal, efektif, dan efisien. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.